BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN KEBIJAKAN OTORITAS PEMERINTAH TERKAIT PENATAAN RUANG

A. Aspek Geografi

1. Luas dan Letak Wilayah

Sumber : (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2010)

Gambar 2.1 Peta Lokasi Administratif Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km^2 atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dai Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis, kota ini terletak antara 110’ 24’1” - 110’ 28’53” Bujur Timur dan antara 07’ 15’24”-07’ 49’26” Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 615 Rukun Warga (RW) dan 2.529 Rukun

Tetangga (RT). Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63 Ha atau sebesar 1,94% luas Kota Yogyakarta. Berikut luas masing-masing kecamatan di kota Yogyakarta.

Tabel 2.1

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km^2)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	Gendongkiwo	0,90	18	86
		Suryodiningratan	0,85	17	70
		Mantrijeron	0,86	20	75
			2,61	**55**	**231**
2.	Kraton	Patehan	0,40	10	44
		Panembahan	0,66	18	78
		Kadipaten	0,34	15	53
			1,40	**43**	**175**
3.	Mergangsan	Brontokusuman	0,93	23	84
		Keparakan	0,53	13	58
		Wirogunan	0,85	24	76
			2,31	**60**	**218**
4.	Umbulharjo	Giwangan	1,26	13	42
		Sorosutan	1,68	17	67
		Pandean	1,38	13	51
		Warungboto	0,83	9	38
		Tahunan	0,78	11	48
		Muja-muju	1,53	12	55
		Semaki	0,66	10	34
			8,12	**85**	**335**
5.	Kotagede	Prenggan	0,99	13	57
		Purbayan	0,83	14	58
		Rejowinangun	1,25	13	49
			3,07	**40**	**164**
6.	Gondokusuman	Baciro	1,06	21	87
		Demangan	0,74	12	44
		Klitren	0,68	16	63
		Kotabaru	0,71	4	20
		Terban	0,80	12	58
			3,99	**65**	**272**

7.	Danurejan	Suryatmajan	0,28	15	45
		Tegalpanggung	0,35	16	66
		Bausasran	0,47	12	49
			1,10	**43**	**160**
8.	Pakualaman	Purwokinanti	0,33	10	47
		Gunungketur	0,30	9	36
			0,63	**19**	**83**
9.	Gondomanan	Prawirodirjan	0,67	18	61
		Ngupasan	0,45	13	49
			1,12	**31**	**110**
10.	Ngampilan	Notoprajan	0,37	8	50
		Ngampilan	0,45	13	70
			1,12	**21**	**120**
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan	0,44	10	51
		Wirobrajan	0,67	12	58
		Pakuncen	0,65	12	56
			1,76	**34**	**165**
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,46	22	87
		Sosromenduran	0,50	14	54
			0,96	**36**	**141**
13.	Jetis	Bumijo	0,58	13	56
		Gowongan	0,46	13	52
		Cokrodiningratan	0,66	11	59
			1,70	**37**	**167**
14.	Tegalrejo	Tegalrejo	0,82	12	46
		Bener	0,57	7	25
		Kricak	0,82	13	61
		Karangwaru	0,70	14	56
			2,91	**46**	**188**
Jumlah		**45**	**32,50**	**615**	**2.529**

Sumber : bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2014)

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi poladan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berikut ini merupakan kondisi kemiringan lahan di kota Yogyakarta.

Table 2.2

Kelas Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta (Ha)

No.	Kecamatan	Luas Kemiringan Lahan (Ha)			
		0-2%	**2-15%**	**15-40%**	**>40**
1.	Mantrijeron	244,43	12,18	4,38	0
2.	Kraton	140,00	0	0	0
3.	Mergangsan	105,05	25,94	0	0
4.	Umbulharjo	764,54	45,04	1,66	0,73
5.	Kotagede	277,80	23,26	2,52	3,94
6.	Gondokusuman	328,58	67,76	2,66	0
7.	Danurejan	75,86	27,64	5,94	0,56
8.	Pakualaman	63,00	0	0	0
9.	Gondomanan	105,92	6,08	0	0
10.	Ngampilan	50,92	31,08	0	0
11.	Wirobrajan	147,44	21,26	6,06	1,33
12.	Gedongtengen	84,44	8,32	2,82	0,42
13.	Jetis	148,32	20,74	0,48	0,46
14.	Tegalrejo	254,66	24,02	8,82	3,50
Jumlah		**2.890,38**	**313,32**	**35,34**	**10,94**
Presentase (%)		**88,92**	**9,63**	**1,07**	**0,33**

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta sebagian besar memiliki kemiringan lahan 0-2% dengan persentase mencapai 88,92% dari luas wilayah. Sementara 9,63% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,07 berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,33% berada pada kemiringan di atas 40%. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam berada di bantaran sungai.

Table 2.3

Kelas Ketinggian di Kota Yogyakarta (Ha)

No.	Kecamatan	Luas Ketinggian (Ha)			Jumlah
		<100m	100-199m	>200m	
1.	Mantrijeron	261	0	0	261
2.	Kraton	140	0	0	140
3.	Margangsan	202	29	0	231
4.	Umbulharjo	607	206	0	813
5.	Kotagede	302	5	0	307
6.	Gondokusuman	0	399	0	399
7.	Danurejan	0	110	0	110
8.	Pakualaman	0	63	0	63
9.	Gondomanan	42	70	0	112
10.	Ngampilan	31	51	0	82
11.	Wirobrajan	72	103	0	175
12.	Gedongtengen	0	96	0	96
13.	Jetis	0	170	0	170
14.	Tegelrejo	0	291	0	292
	Jumlah	**1.657**	**1.593**	**0**	**3.250**

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2015)

Kondisi ketinggian wilayah di Kota Yogyakarta berada pada ketinggian kurang dari 200 mdpl. Kondisi ketinggiannya dapat dibagi menjadi dua kelas ketinggian, yaitu 1.657 Ha wilayah berada pada ketinggian <100 mdpl dan 1.593 Ha berada pada ketinggian 100-199m dpl. Ketinggian <100 mdpl berada di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Ngampilan, Wirobrajan dan Gondomanan. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian 100-199 mdpl berada di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Jetis, Gedongtengen, dan Tegalrejo.

3. **Kondisi Hidrologi**

Kota Yogyakarta dialiri oleh 3 sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Daerah Alirang Sungai (DAS) yang ada di Kota Yogyakarta adalah DAS Opak Oyo. DAS Opak Oyo terdiri dari 3 Sub DAS antara lain Sub DAS Opak, Sub DAS Oyo I, dan Sub DAS Winongo.

4. **Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan dominan di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014 adalah lahan perumahan. Namun jika dilihat dari grafiknya, luas lahan perumahan menunjukkan kecenderungan menurun. Luas lahan perumahan dari 2105,39 Ha pada tahun 2010, cenderung menurun tapi menjadi 2102,12 Ha tahun 2014. Guna lahan pertanian mengalami penurunan, dari 118,59 Ha di tahun 2010 menjadi 105,60 Ha di tahun 2014.

Table 2.4

Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2010-2014

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Ha)				
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1.	Perumahan	2105,39	2104,31	2105,07	2100,72	2102,12
2.	Jasa	279,37	279,64	279,59	280,57	281,06
3.	Perusahaan	286,14	289,58	294,19	300,73	303,25
4.	Indrustri	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23
5.	Pertanian	118,59	115,96	111,81	109,15	105,60
6.	Non Produktif	20,11	20,11	18,94	18,43	17,59
7.	Lain –lain	388,16	388,16	388,16	388,16	388,16
Jumlah		**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2010-2014)

Sementara untuk penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalah sektor jasa seperti kegiatan perdagangan. Peningkatan dari luas guna lahan 279,37 Ha pada tahun 2010, menjadi 281,06 Ha pada tahun 2014. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian kota Yogyakarta yang ditopang oleh sector jasa. Berikut grafik perkembangan guna lahan di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

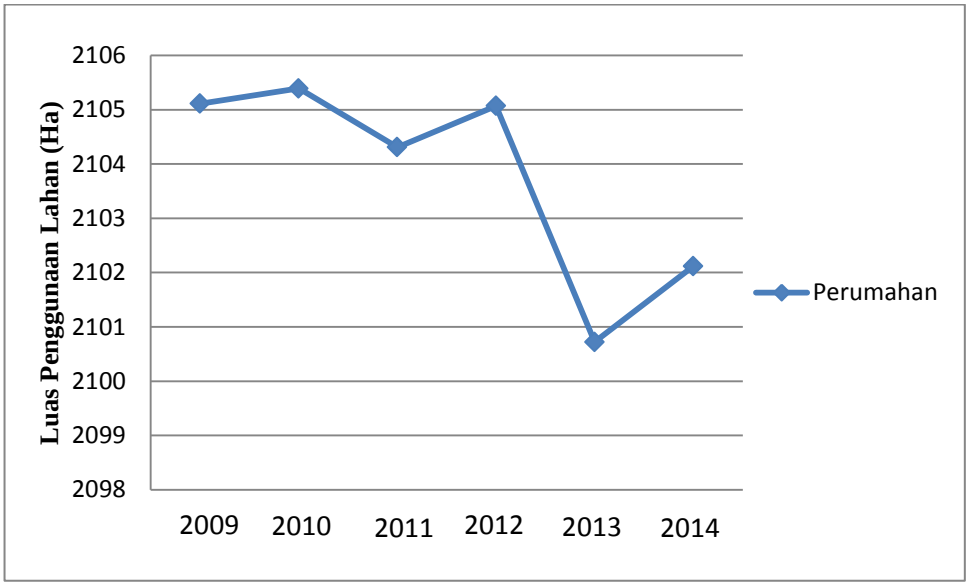

Sumber : RKPD, 2017

Gambar 2.2
Grafik Luas Penggunaan Lahan Perumahan Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 antara lain:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan

a. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi :

1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan,Gedongtengen, dan Gondomanan.

2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.

b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi :

1) Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi diSeluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Perwujudan Sistem Transportasi

a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi :

1) Jaringan arteri primer

Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yang terdiri atasJaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan.

2) Jaringan jalan arteri sekunder

a) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas :

i. Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni,Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo.

ii. Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.

b) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yangmenghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yang terdiri atas :

i. Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.

3) Jembatan

Pembangunan jembatan fly over pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.

3. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya

a. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :

1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta.

2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.

b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :

1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.

3) Jaringan pelayanan *feeder*, yang berlokasi di seluruh wilayah KotaYogyakarta.

c. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), meliputi :

1) Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusakair, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

d. Jaringan persampahan, meliputi :

1) Penambahan lahan TPA Piyungan, yang berlokasi di Kabupaten Bantul.
2) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.

e. Air limbah, meliputi :

1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.
2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.

f. Air Minum, melalui :

1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.
2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
3) Pembelian truk tangki air minum.

B. Aspek Demografi

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti kualitas pelayanan publik dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 mencapai 413.936 jiwa yang terdiri dari 202.296 laki-laki dan 211.640 perempuan. Tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah penduduk 0,02% dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 406.660 jiwa. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai 2014, jumlah penduduk tertinggi ada pada tahun 2010 yang mencapai 457.568 jiwa, sedangkan yang terendah ada di tahun 2013. Berikut ini data perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

Tabel 2.5

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Laki –Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
1.	2010	227.766	229.902	457.568	0,00
2.	2011	217.378	222.765	440.143	-0,04
3.	2012	210.468	217.123	427.591	-0,03
4.	2013	198.892	207.768	406.660	-0,05
5.	2014	202.296	211.640	413.936	0,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2014

2. Kepadatan

Kepadatan penduduk dihitung untuk mengetahui rata-rata jumlah penduduk dalam 1 km. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kepadatan penduduk mencapai 14.079 jiwa/km^2, kemudian mengalami penurunan hingga 13.543 jiwa/km^2 pada tahun 2011. Namun kembali mengalami penurunan hingga 12.513 jiwa/km^2 pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 12.736 jiwa/km^2.

Tabel 2.6

Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk ($jiwa/km^2$)
1.	2010	32,5	457.568	14.079
2.	2011	32,5	440.143	13.543
3.	2012	32,5	427.591	13.157
4.	2013	32,5	406.600	12.513
5.	2014	32,5	413.936	12.736

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2014

3. Distribusi (kepadatan penduduk per kecamatan)

Distribusi penduduk di Kota Yogyakarta tersebar ke dalam 14 kecamatan. Pada tahun 2014, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Ngampilan dengan kepadatan mencapai 22.977 $jiwa/km^2$. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk di Kecamatan Ngampilan telah mengalami banyak penurunan, kepadatan penduduk tahun 2010 mencapai 26.210 $jiwa/km^2$. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Umbulharjo dengan kepadatan pendudukhanya 8.329 $jiwa/km^2$. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan ini sudah mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 kepadatan penduduk mencapai 3.457 $jiwa/km^2$. Berikut data kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

Tabel 2.7

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tegalrejo	2,91	14.133	14.800	13.222	12.481	12.703
2.	Jetis	1,70	18.641	17.809	16.810	16.318	16.435
3.	Gondokusuman	3,99	13.179	11.922	11.638	10.607	10.775
4.	Danurejan	1,10	22.115	21.488	21.202	19.191	19.580
5.	Gedongtengen	0,96	24.147	23.001	22.394	21.644	21.935
6.	Ngampilan	0,82	26.210	24.771	23.268	22.706	22.977
7.	Wirobrajan	1,76	17.289	16.605	15.995	15.468	15.773
8.	Mantrijeron	2,61	14.698	14.402	14.431	13.392	13.647
9.	Kraton	1,40	17.716	17.243	16.599	15.824	16.073
10.	Gondomanan	1,12	15.229	15.036	14.472	13.563	13.758
11.	Pakualaman	0,63	19.171	18.667	17.919	17.113	17.219
12.	Mergangsan	2,31	15.965	14.660	14.244	13.639	13.859
13.	Umbulharjo	8,12	8.576	8.532	8.381	8.121	8.329
14.	Kotagede	3,07	11.082	10.884	10.650	10.447	10.689
Kota Yogyakarta		**32,5**	**14.029**	**14.082**	**13.543**	**13.157**	**12.513**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2014

4. Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan data yang ada, terdapat 7 (tujuh) agama yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diantaranya Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan. Pada tahun 2014, mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama islam, yaitu sebesar 82,51% penduduk, kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sebesar 10,49%

dan pemeluk Kristen sebesar 6,52%. Berikut data jumlah penduduk menurut agama di Kota Yogyakarta Tahun 2014.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Yogyakarta

Tahun 2014

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Islam	168.010	173.528	341.548	82,512
2.	Kristen	12.782	14.213	26.995	6,522
3.	Katholik	20.513	22.911	43.424	10.491
4.	Hindu	299	266	565	0,136
5.	Budha	656	706	1.362	0,329
6.	Khonghucu	16	10	26	0,006
7.	Kepercayaan	10	6	16	0,004
Jumlah		**202.296**	**211.640**	**413.936**	**100**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2014

C. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Kondisi Sosial Kota Yogyakarta

Kondisi sosial masyarakat kota Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan aspek kesehatan diamana aspek tersebut selalu memiliki pemcapian target kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan dewasa, dan menurunkan frafelensi buruk. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah kota berupaya dalam menyediakan sarana dan prasaranan kegiatan yang disertai dengan tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Berdasarkan BPS DIY, pemerintah kota Yogyakarta telah mengupayakan sarana kesehatan yang meliputi 54 unit rumah sakit, 26 unit rumah bersalin, 177 unit balai pengobatan dan 120 unit puskesmas induk dan 1.542 praktek dokter perorangan.

Kondisi sosial masyarakat Yogyakarta juga memiliki keterkaitan dengan kualitas pendidikan diamana kualitas yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan akan menuntut ketersedianya penyelenggaraan pendidikan yangs semakin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan oleh pemeritah maupun swasta. Berdasarkan BPS DIY diketahui bahwa jenjang pendidikan TK hingga sekolah menengah atas tercatat sebanyak 5.073 unit, jenjang sekolah dasar memiliki 1.862 unit, jenjang pendidikan SMP sebanyak 422 unit, SMU sebanyak 192 unit, jenjang perguruan negeri sebanyak 10 unit, jenjang perguruan swasta sebanak 120 institusi dengan rincian 41,67% akademi, 33,33% sekolah tinggi, 15% universitas, 6,67% politekhnik dan 3,33% institusi. Hal ini berarti bahwa semua jenjang pendidikan sudah merata dan sudah menjangkau seluruh wilayah Yogyakarta.

Aspek sosial kota Yogyakarta juga digambarkan dengan adanya unsur kriminalitas dan peradilan. Kriminalitas menggambarkan adanya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat sekaligus merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan yang serius. Banyaknya prakara kriminal yang dilaporkan ke POLDA provinsi Yogyakarta adalah kasus penculikan, pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan, pengeaniayaan, ujuk rasa dan narkotika. Kondisi sosial kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh pristiwa bencana

alam yang merugikan aspek material berupa kerusakan rumah atau penghunian. Aspek sosial di Yogyakrta juga mempengaruhi oleh kasus kebakaran yang juga menimbulkan merugian material (BPS,2017).

2. Kondisi Ekonomi Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dalam mencapai target atau terealisasinya implementasi penataan ruang tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Yogyakarta. Pemerintah DIY terutama pemerintah kota dalam upaya memajukan penataan ruang yag bertujuan untuk memajukan tata ruang Yogyakara menggunakan beberapa sumber pendanaan. Sumber-sumber pendanaan tersebut bertumpu pada pendapatan pajak, pendapatan retribusi pendapatan daerah dan pendanaan pusat dan PAD yang sah. Kelompok dana perimbangan lebih bertumpu pada dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Sedangkan kelompok pendapatan yang sah lebih bertumpu pada pendapatan hibah dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Pemerintah kota Yogyakarta dalam mengendalikan struktur tata ruang juga mengupayakan iklim investasi dimana pemerintah harus meningkatkan pelayanan dibidang insvenstasi untuk bisa memenangkan persaingan dengan daerah-daerah lain baik di Indonesia atau di luar negeri. Karena investasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di kota Yogyakarta khususnya dalam meningkatkan kapasitas industri domestik. Disamping nilai investasi yang diharapkan terus naik

pemerintah kota Yogyakarta harus memperhatikan pemerataan investasi yang sesuai dengan kebutuhan investasi yang dimiliki oleh kota Yogyakarta.

Berdasarkan RPJMD kota Yogyakarta tahun 2012-2017 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun 2013 sebesar 5,80%, 2014 sebesar 6,00%, 2015 sebesar 6,20%, 2016 sebesar 6,40% dan 2017 sebesar 6,61%. RPJMD tersebut akan tercapai jika setiap lapangan usaha memenuhi target sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Beberapa lapangan usaha yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Yogyakarta diantaranya adalah perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, perusahaan jasa, keuangan, dan *real state.* Selain beberapa bidang tersebut pemerintah kota Yogyakarta dalam memajukan pertumbuhan ekonomi juga menggalakan beberapa sektor seperti pariwisata dan pendidikan dimana aspek pariwisata tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, serta keuangan dan jasa. Sedangkan aspek pendidikan memiliki keterkaitan dengan perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2017 menyatakan bahwa lapangan usaha dominan di kota Yogyakarta yang sangat memacu pertumbuhan ekonomi adalah aspek perdagangan di tahun

2017 sebesar Rp.2.130.449.000, aspek transportasi sebesar Rp.1.840.149.000, aspek perusahaan jasa Rp.1.476.307.000, dan pada aspek keuangan sebesar Rp.1.094.439.000 (BPS,2017).

Berdasarkan BPS tahun 2017 beberapa aspek yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta di antaranya adalah lapangan usaha pertanian sebesar Rp.4.547.994.000, lapangan usaha pertambangan sebesar Rp.1.956.720.000, lapangan usaha industri sebesar Rp.3.530.122.000, lapangan usaha listrik sebesar Rp.2.955.040.000 dan lapangan usaha kontruksi sebesar Rp.3.101.975.000 (BPS,2017).

Kondisi pertumbuhan atau laju perekonomian di kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh konduisi inflansi. Salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi inflasi adalah pengendalian moneter dan kebijakan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, semakin majunya perekonomian kota Yogyakarata maka kecenderungan inflasi juga semakin besar, oleh karena itu pemerintah kota Yogyakarta harus mampu mengendalikan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat.

Berdasarkan BPS tahun 2017, DIY memiliki inflasi sebesar 8,06%. Hal ini merupakan pernyataan Bank Indonesia DIY yang berarti bahwa ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil,

perdagangan serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi.Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi. Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di kota Yogyakarta. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di kota Yogyakarta.

Berdasarkan BPS tahun 2015, kondisi perekonomian daerah kota Yogyakrta berdampak pada aspek angkatan kerja yang terjadi pada tahun 2015-2016. Proyaksi tahun 2015-2016, kota Yogyakarta menunjuka bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang berkerja sama-sama mengalami kenaikan tetapi pengganguran terbuka mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju perekonomian kota Yogyakrata, khususnya kemampuan tenaga kerja. Di satu sisi, kondisi

perekonomian di kota Yogyakarta juga akan mempengaruhi kondisi kemiskinan dimana diketahui bahwa persentase penduduk miskin di kota Yogyakarta selama periode 2008 hingga 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan perubahan kondisi yang semakin membaik. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun penurunan penduduk miskin dirasakan masih terlalu kecil karena jumlah yang diharapankan masih jauh dibawah target yaitu jumlah penduduk miskin hanya turun sebesar 2% per tahunnya (BPS, 2017).

3. Kondisi Budaya Kota Yogyakarta

Upaya pemerintah Yogyakarta dalam mewujudkan aspek tata ruang tidak terlepas dari unsur budaya Yogyakarta dimana unsur budaya tersebut merupakan salah satu indikator dalam penentuang terselenggaraya aspek tata ruang. Penduduk di Kota Yogyakarta memiliki populasi yang cukup tinggi yaitu 13.177 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta menurut sensus tahun 2010 adalah 388.088 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki – laki dan perempuan yang hampir setara.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Yogyakarta adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Adapun bahasa kedaerahan lainnya yang sering ditemui di dalam komunitas masyarakat mengingat banyaknya pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia

maupun dunia. Bahasa internasional yang diwajibkan untuk pendidikan di kota Yogyakarta adalah Bahasa Inggris.

Budaya yang ada di Kota Yogyakarta dan masih terus dilestarikan adalah budaya Jawa. Baik keluarga yang berasal dari Kraton Yogyakarta maupun warga pada umumnya melestarikan kebudayaan Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan pada acara penting lainnya seperti budaya pernikahan yang disebut dengan *mantenan*, *siraman*, budaya kelahiran bayi, budaya pencucian keris oleh keluarga Kraton Yogyakarta, dan sebagainya. Adapun budaya yang berupa kesenian seperti kesenian tari Jathilan, Ketoprak, dan Sendra Tari Ramayana. Penampilan kesenian tersebut biasanya juga diiringi oleh alunan musik tradisional seperti Gamelan. Adapun kesenian wayang, batik, dan kerajinan tangan yang masih sering ditemui di Kota Yogyakarta (BPS, 2017).

D. Pekerjaan Umum

Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dimana mempunyaikegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atau ditiadakan karena tidak tepat apabila

digunakan untuk mengukur kinerja kewilayahan di Kota Yogyakarta, yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Dalam SPM kondisi jalan sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang.

Tabel 2.9

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Kondisi jalan baik	Km	203,66	203,76	211,16	223,80	205,00	216	1,18
2.	Panjang jalan penghubung pusat kota	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	-
3.	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	%	82,09	82,13	85,11	90,21	82,63	87,06	1,17

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2015 semakin

menunjukkan kecenderungan yang positif. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 kondisi jalan baik di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,18% per tahun, sedangkan di tahun yang sama, panjang jalan penghubung pusat kota di Kota Yogyakarta tidak mengalami pertumbuhan (stagnan). Sehingga dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terjadi peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai 1,17%. Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) menjadi 100%, persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) menjadi 100%, persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan dari 80% menjadi 81% di wilayah Kota Yogyakarta.

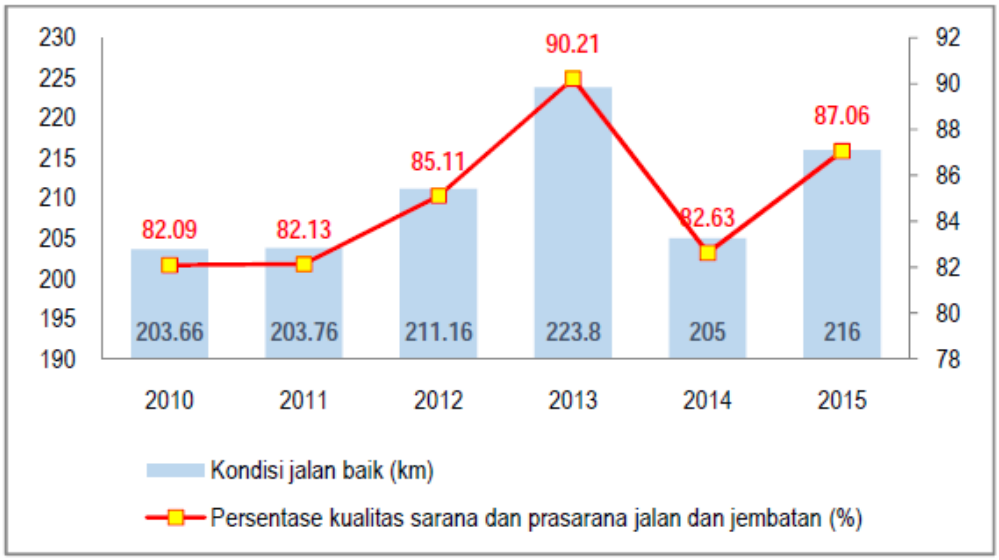

Sumber : RKPD, 2017

Gambar 2.3
Grafik Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta 2010-2015

Meskipun dari tahun 2010 hingga tahun 2013 kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan khususnya pada kondisi jalan yang baik mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun 2014 kondisi jalan yang baik sempat mengalami penurunan. Di tahun 2015 kondisi jalan yang baik kembali meningkat menjadi 216 km atau 87,06% dari keseluruhan jalan yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU No.01/PRT/M/2014 permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Data yang digunakan untuk perhitungan indikator ini berasal dari dokumen SIPD Numerik Tahun 2015 dan sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.10

Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	2.888,04	2.893,39	2.898,12	2.902,61	2.906,88	2.723,11	-1,17
2.	Luas Wilayah Permukiman	Ha	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988	-
3.	Rasio permukiman layak huni		0,967	0,968	0,970	0,971	0,973	0,911	-1,17

Sumber :

- *SIPD Numerik Tahun 2015 dengan Hasil Olahan dan Badan Perancanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan*

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Yogyakarta dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun rasio permukiman layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -1,17%. Menurunnya jumlah luas permukiman layak huni ini terjadi akibat adanya penurunan kualitas permukiman yang mengakibatkan luas permukiman tidak layak huni (kumuh) di tahun 2015 yang justru mengalami peningkatan.

3. Lingkungan Permukiman Kumuh

Indikator lingkungan permukiman kumuh memiliki kesamaan formula dengan indikator lingkungan permukiman pada urusan pekerjaan umum. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah dengan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.11

Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas kawasan kumuh	Ha	99,59	94,61	89,88	85,39	81,12	264,89	21,61
2.	Luas wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	-
3.	Lingkungan prmukiman kumuh	%	3,06	2,91	2,77	2,63	2,50	8,15	21,64

Sumber :SIPD Numerik Tahun 2014 dengan Hasil Olahan dan Badan Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami penurunan, yakni sebesar 99,59 hektar pada tahun 2010 menurun menjadi 81,12 hektar pada tahun 2014. Luasan kawasan kumuh ini justru mengalami peningkatan yang cukupdrastis di tahun 2015 menjadi 264,89 hektar atau 8,15% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan SK Walikota Nomor 393 Tahun 2014, sebagian besar permukiman tersebut umumnya terdapat di sepanjang bantaran Kali Winongo, Kali Code dan Kali Gadjah Wong. Peningkatan luas kawasan kumuh ini kemungkinan terjadi karena adanya pembaharuan data dengan kriteria penghitungan yang lebih detil, mengingat luasan permukiman tertata dari tahun ke tahun diketahui justru mengalami kenaikan meskipun dengan luas wilayah permukiman yang cenderung stagnan.

Sumber : RKPD, 2017

Gambar 2.4
Grafik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk semakin mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) dibeberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementrian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta.

4. **Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota (Aksesibilitas)**

Formula yang digunakan untuk menghitung jalan pengubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk adalah dengan membagi jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda empat dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dan dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tidak ada pendataan mengenai formula pembagi untuk perhitungan indikator ini. Indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat) ini digunakan untuk menghitung aksesibilitas wilayah, namun pada dasarnya kondisi KotaYogyakarta tidak terdapat wilayah yang terisolir, sehingga dapat dikatakan bahwa kesemua jalan di Kota Yogyakarta dapat diakses dan atau dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Tabel 2.12

Presentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota Yogyakarta (Aksesibilitas) Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total panjang jalan eksisting	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09
2.	Total rencana panjang jalan	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09
3.	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Dalam indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, untuk menghitung aksesibilitas (persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota) menggunakan formula jumlah panjang jalan eksisting dibagi dengan total rencana panjang jalan dikalikan dengan bilangan 100. Panjang jalan eksisting dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 adalah sepanjang 248,09 km (panjang jalan bernomor ruas jalan), sedangkan total rencana panjang jalan yang ditetapkan di Kota Yogyakarta adalah sepanjang 248,09 km, sehingga dalam kurun waktu 2010 hingga tahun2015 nilai indikator aksesibilitas di Kota Yogyakarta adalah 100%.

5. Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai

Formula yang dipergunakan untuk menghitung sempadan sungai yang dipakai bangunan rumah liar adalah panjang sempadan sungai

yang dipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungai kota dikali dengan bilangan 100. Namun data untuk indikator tersebut tidak dapat ditemukan karena belum pernah dilakukan pendataan, sehingga indikator ini diganti dengan data mengenai luasan areal permukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.13

Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas areal permukiman di bantaran sungai	Ha	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	-

Sumber :SIPD Numerik Tahun 2015

Luas areal permukiman di bantaran sungai wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan luasan yang sama dalam kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2015. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Yogyakarta sendiri yang secara administratif belum memiliki Perwal mengenai panjang sempadan sungai, sehingga selama ini sempadan sungai yang ditentukan oleh Kota Yogyakarta masih mengikuti sempadan sungai yang ditetapkan oleh provinsi (15 meter dari sungai). Namun apabila ditarik garis dari sungai, sempadan sungai di Kota Yogyakarta tidak ada yang berjarak 15 meter (bangunan di pinggir sungai tersebut melanggar aturan sempadan sungai, baik di Code, Winongo, dan Gajahwong).

Selanjutnya, sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta, berada dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, sempadan sungai sesuai PP No. 38 tahun 2011 tentang sungai kewenangan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu –Opak, sehingga data untuk sempadan sungai yang dipakai bangunan liar tidak dapat diperoleh. Selain itu pula, di Kota Yogyakarta cukup banyak bangunan yang terletak di sepanjang sungai. Namun tanah di sepanjang sungai tersebut sebagian besar merupakan tanah Magersari (tanah milik Keraton Yogyakarta). Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya memiliki sertifikat hak milik dan hak pakai, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bangunan liar.

E. Penataan Ruang

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, di antaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula dari Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta di masing-masing indikator sebagai berikut:

1. **Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah**

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, diantaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula dari Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

Perbandingan dilakukan dengan melihat persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah di Kota Yogyakarta. Melalui perhitungan tersebut terlihat pertumbuhan persentase RTH yang cenderung positif. Dari data diketahui bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015. Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai yang ditunjukkan oleh persentase RTH publik terhadap luas wilayah, yakni sebesar 18,94% di tahun 2011 yang meningkat menjadi 19,05% di tahun 2015.

Tabel 2.14

Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas RTH publik	Ha	615,55	615,875	616,2	618,15	619,189	0,15
2.	Luas wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	-
3.	Persentase RTH terhadap luas wilayah	%	18,94	18,95	18,96	19,02	19,05	0,14

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015

Dibalik peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015, terdapat permasalahan dalam upaya peningkatan luasan ruang terbuka hijau untuk masa mendatang, yakni adanya kendala mengenai keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Hal tersebut mengingat luasan wilayah Kota Yogyakarta yang stagnan namun dihadapkan dengan berbagai perubahan pembangunan yang membutuhkan ruang kosong sebagai lahannya.

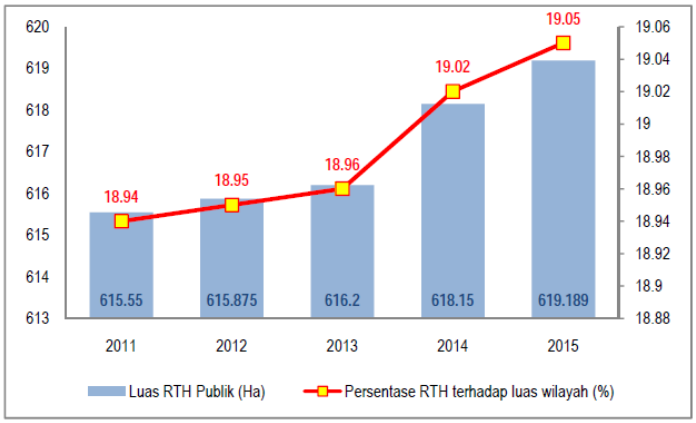

Sumber : RKPD, 2017

Gambar 2.5
Grafik Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan berIMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.15

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	Unit	64.013	65.140	66.330	67.512	68.602	69.410	1,63
2.	Jumlah Bangunan	Unit	87.830	88.676	89.649	90.649	91.921	91.921**)	0,91
3.	Rasio Banguan		0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,81

Sumber :

- *Data Brbasis Sembilan Fungsi Petrncanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 (Data Tahun 2010-2013)*
- *LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 (Data Tahun 2014)*
- *Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2016 (masih menggunakan data tahun 2014)*

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan, yakni sebanyak 64.013 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi 69.410 unit dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,63% per tahun. Kondisi yang meningkat juga terjadi pada jumlah bangunan di Kota Yogyakarta dengan peningkatan bangunan rata-rata sebesar 0,91% per tahun.

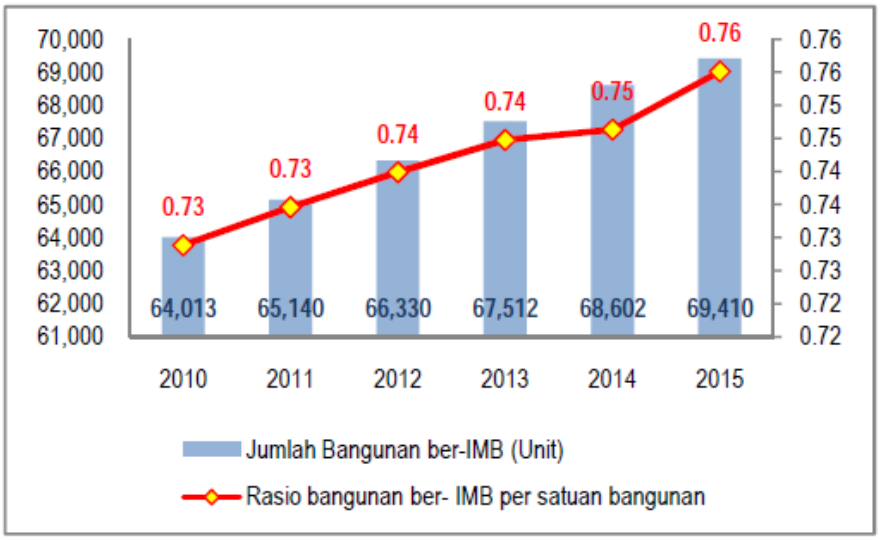

Sumber : RKPD, 2017

Gambar 2.6
Grafik Rasio IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Kedua indikator pembentuk tersebut memiliki perbandingan terbalik dengan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014, yakni sebesar 0,77 pada tahun 2009 menurun menjadi 0,75 pada tahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,73% per tahun.

3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Formula yang digunakan dalam perhitungan ruang publik yang berubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yang tersedia. Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat pada tahun 2010 terdapat perubahan lahan seluas 27.400 m^2 terdapat di

Giwangan, yakni perubahan Dinas Pertanian Balai Benih menjadi Sport Training Center. Kemudian di tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional KotaYogyakarta juga mencatat perubahan Terminal Lama (Terminal Giwanganmenjadi Pasar Seni (XT Square), dengan perubahan lahan seluas 18.398m^2. Selain itu perubahan peruntukan juga terjadi pada tahun 2013, yakni perubahan Tempat Hiburan Rakyat (THR) atau yang biasa dikenal dengan Purawisata yang terletak di jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, yang berubah menjadi bangunan hotel denganluas 24.690 m^2. Sedangkan ditahun 2012, 2014 dan 2015 tidak tercatat perubahan apapun pada ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.16

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	m^2	27.400	18.398	0	24.690	0	0

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2016

F. Pertanahan

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami

penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah

Sesuai dengan Permendagri 54/2010, formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah penduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formula tersebut dirasa meragukan dengan bilangan pembanding adalah jumlah penduduk, sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah.

Tabel 2.17

Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas lahan bersertifikat	Ha	1.342,63	1.386,52	1.418,46	1.472,67	1.577,60	1.646,22	4,16
2.	Luas wilayah	Ha	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250	-
3.	Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah	%	41,31	42,66	43,64	45,31	48,54	50,65	4,16

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Tercatat seluas 1.342,63 hektar lahan bersertifikat di tahun 2010

kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 1.645,22 lahan bersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,16%. Peningkatan juga terlihat dari persentase luas lahan bersertifikat terjadap luas wilayah, yakni41,31% pada tahun 2010 meningkat menjadi 50,65% pada tahun 2015 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,16% per tahun.

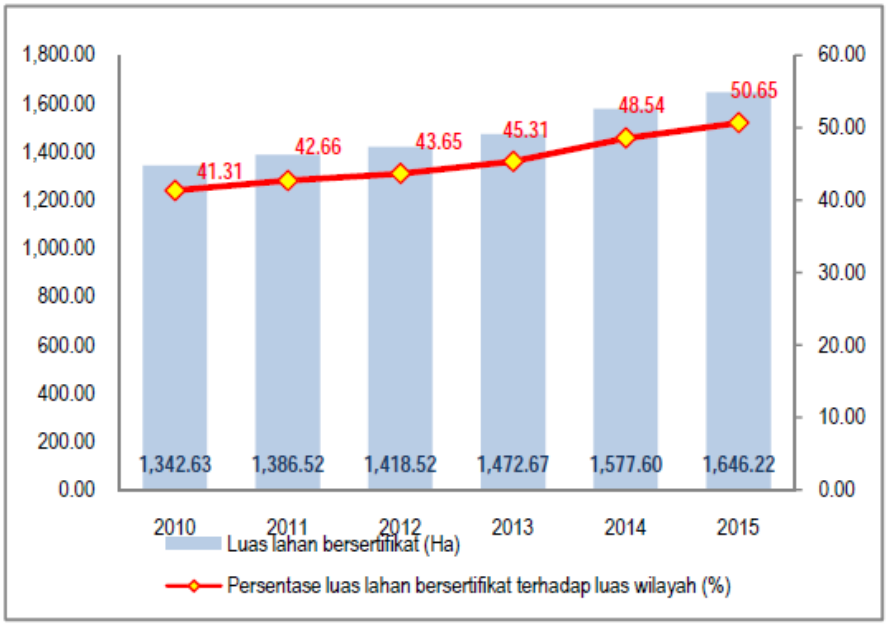

Sumber : RKPD, 2017

Gambar 2.7
Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

2. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaianizin lokasi dalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.18

Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah izin lokasi	Unit	1	0	1	1	0	1
2.	Permohonan izin lokasi	Unit	1	0	1	1	0	1
3.	Penyelesaian izin lokasi	%	100	0	100	100	0	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat jumlah izinlokasi di tahun 2010 merupakan izin lokasi untuk pembangunan perumahan seluas 13.977 m^2 terletak di Jl. Babaran, Kelurahan Pendeyan, Kecamatan Umbulharjo; izin lokasi pada tahun 2012 merupakan izin lokasi untuk pembangunan kondominium/hotel seluas 12.227 m^2 terletak diKelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; sedangkan pada tahun2013 merupakan izin lokasi untuk pembangunan hotel (semulaPurawisata) seluas 24.690 m^2 terletak di Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Sedangkan di tahun 2015 permohonan izin lokasi dilakukan sebatas untuk mengganti kepemilikan tanah gudang susu milik Perusahaan SGM.

G. Perhubungan

Sesuai dengan yang tertulis dalam Permendagri 54/2010, terdapat empat indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlah arus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah terminal bis, angkutan darat,

dan pemasangan rambu-rambu. Dalam urusan perhubungan juga terdapat beberapa indikator yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, misalnya adalah indikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota yang menggantikan indikator jumlah arus penumpang umum.

1. **Angkutan Umum yang Melewati Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalanuntuk Jaringan Jalan Kota**

   Indikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota merupakan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada dan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota dengan jumlah angkutan umum yang seharusnya ada dan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota.

Tabel 2.19

Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014
1.	Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	Unit	9640	9797	9650
2.	Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	Unit	9640	9797	9650
3.	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	%	100	100	100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubugan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Angkutan umum yang melintasi Kota Yogyakarta diantaranya adalah Bis jalur 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Namun kini hanya tersisa beberapa jalur yang aktif beroperasi diantaranya adalah bis jalur 2 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Menteri Supeno – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan Sisingamangaraja – Ring Road Selatan – Jalan Parangtritis – Jalan Brigjend Katamso – Jalan Suryotomo – Abu Bakar Ali – Jalan Suroto – Jalan Cik Di Tiro – Lingkar UGM – dan kembali ke rute yang sama); bis jalur 4 (denganrute Terminal Giwangan – Ring Road Selatan – Ngangkruk – Gedong Kuning– Jalan Kusumanegara – Jalan Suryotomo – Jalan Suroto – Lingkar UGM –Jalan C. Simanjuntak – Jalan Jendral Sudirman – Jalan P. Mangkubumi –Jalan Malioboro –

Jalan P. Senopati – Jalan Kusumanegara – Gedong Kuning– Ring Road Selatan – Terminal Giwangan); bis jalur 7 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Gambiran – Jalan veteran – Gedong Kuning – Janti – Jalan Adisucipto – Jalan Affandi – Ring Road Utara – Lingkar UGM); bis jalur 12 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Pandean – Jalan Glagah Sari –Jalan Kusumanegara – Sultan Agung – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Cokroaminoto – Jalan Tentara Pelajar – Borobudur Plaza – Jalan Wolter Monginsidi – Lingkar UGM – Jalan Wolter Monginsidi – Borobudur Plaza –Jalan Tentara Pelajar – Jalan Cokroaminoto – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Sultan Agung – Jalan Suryopranoto – Jalan Mangunsarkoro – Jalan Kusumanegara – Jalan Glagah Sari – Jalan Veteran – Jalan Pramuka –Terminal Giwangan); serta bis jalur 15 (dengan rute Terminal Giwangan –Jalan Pramuka – Jalan Sisingamangaraja – Jalan Menukan – Jalan Mangkuyudan – Gading – Pojok Beteng Timur – Jalan Brigjend Katamso –Jalan Ibu Ruswo – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Wates – Pasar Gamping – Sidoarum – Jalan Godean – Pingit – Jalan Wolter Monginsidi – Jetis – Lingkar UGM).

Di samping bis perkotaan, terdapat pula bis Trans Jogja yang melintasi Kota Yogyakarta, di antaranya adalah Trayek 1A (dengan rute Terminal Prambanan – Bandara Adisucipto – Stasiun Tugu – Malioboro –JEC); Trayek 1B (dengan rute Terminal Prambanan – Bandara

Adisucipto –JEC – Kantor Pos Besar – Pingit – UGM); Trayek 2A (dengan rute Terminal Jombor – Malioboro – Basen – Kridosono – UGM – Terminal Condong Catur); Trayek 2B (dengan rute Terminal Jombor – Terminal Condong Catur – UGM – Kridosono – Basen – Kantor Pos Besar – Wirobrajan –Pingit); Trayek 3A (dengan rute Terminal Giwangan – Kotagede – Bandara Adisucipto – Ring Road Utara – MM UGM – Pingit – Malioboro – Jokteng Kulon); Trayek 3B (dengan rute Terminal Giwangan – Jokteng Kulon –Pingit – MM UGM – Ring Road Utara – Bandara Adisucipto – Kotagede); Trayek 4A (dengan rute Terminal Giwangan – Taman Siswa – Pakualaman– Lempuyangan – Kridosono); serta Trayek 4B (dengan rute Terminal Giwangan – XT Square – SGM – Balaikota – UIN – Kridosono – Balai Yasa –UIN).

2. Rasio Izin Trayek

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase izin trayek adalah jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Di dalam Permendagri 54/2010 menjelaskan bahwan izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Trayek diartikan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Indikator persentase ijin trayek untuk lingkup Kota Yogyakarta, tidak dapat diisikan datanya. Hal ini dikarenakan kewenangan ijin trayek dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi izin trayek yang melewati wilayah KotaYogyakarta saja. Disamping itu, angkutan darat lainnya, seperti travel dan taksi juga merupakan kewenangan provinsi.

Angkutan kota yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta hanya "Si Thole" yang merupakan angkutan wisata. "Si Thole" mulai dioperasikan pada bulan November tahun 2014. Angkutan wisata ini memiliki tiga rute utama, yakni (1) dari Taman Parkir Ngabean menuju Keraton Yogyakarta, dimana rute ini melewati Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, KeratonYogyakarta, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (2) dari Taman ParkirNgabean menuju Tamansari, dimana rute ini melintasi jalan Rotowijayan,Ngasem, Sompilan, Tamansari, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (3)dari Taman Parkir Ngabean menuju Taman Pintar, dimana rute ini melintasi Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Brigjen Katamso, Taman Parkir Senopati, Titik Nol Kilometer, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean.

3. Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api

Terminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis di Kota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kecamatan Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan.

Tabel 2.20

Jumlah terminal Bis, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah halte permanen Transjogja	Unit	34	34	34	34	34	34
3.	Jumlah halte portable bis Transjogja	Unit	-	-	-	23	23	30
4.	Jumlah stasiun kereta api	Unit	2	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, dimana terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Disamping itu juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bis Transjogja. Bis Transjogja menggunakan dua jenis

halte, yakni halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk halte permanen yang berada di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta (milik Pemkot) terdapat 34 halte Transjogja (masih sama jumlahnya sejak penandatanganan MoU Transjogja tanggal 16 Agustus 2007 hingga saat ini), dimana yang membangun halte tersebut adalah pihak swasta dengan cara kerja sama dengan Pemerintah kota Yogyakarta. Sedangkan sisanya, yakni halte milik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (berada di Sleman dan Bantul, serta beberapa yang terdapat di Kota Yogyakarta). Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjam pakaikan ke propinsi,sehingga semua halte sekarang dioperasikan semuanya oleh provinsi. Selain terdapat halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte portable untuk bis Transjogja, yakni sebanyak 23 unit dan tidak ada penambahan halte portable pada tahun 2014 kemudian bertambah lagi ditahun 2015 menjadi 30 halte portable.

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan berada dibawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ketimur berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Danurejan.

Stasiun Lempuyangan melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas ekonomi.

Masyarakat dapat memilih model transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhandan kemampuannya masing-masing, baik model transportasi umum maupun model transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bis bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta. Bisa diamati tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (sold out) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

4. Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan

Indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator kriteria transportasi berkelanjutan, dimana indikator ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah penumpang angkutan umum dengan jumlah kendaraan. Jumlah angkutan umum dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilai dengan kecenderungan meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,76% per tahun, hal tersebut diikuti juga dengan peningkatan jumlah kendaraan yang lebih besar dari peningkatan

jumlah angkutan umum. Pada tahun 2010, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta sebanyak 243.849 unit yang meningkat hingga mencapai 430.177 unit kendaraan pada tahun2015, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,02% per tahun.

Tabel 2.21

Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan

Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah angkutan umum	Unit	10.643	10.985	11.382	12.011	11.663	12.803	3,76
2.	Jumlah kendaraan	Unit	243.849	252.726	257.233	300.444	441.708	430.177	12,02
3.	Persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan	%	4,36	4,35	4,42	4,00	2,64	2,98	(-7,35)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Nilai yang ditunjukkan oleh indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, yakni sebesar 4,36% di tahun 2010 turun menjadi 2,98% di tahun 2015, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -7,35% per tahun. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, jumlah angkutan umum dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 justru cenderung bertambah. Namun adanya jumlah pertumbuhan rata-rata yang masih cenderung menurun juga mengindikasikan bahwa penduduk banyak yang beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.

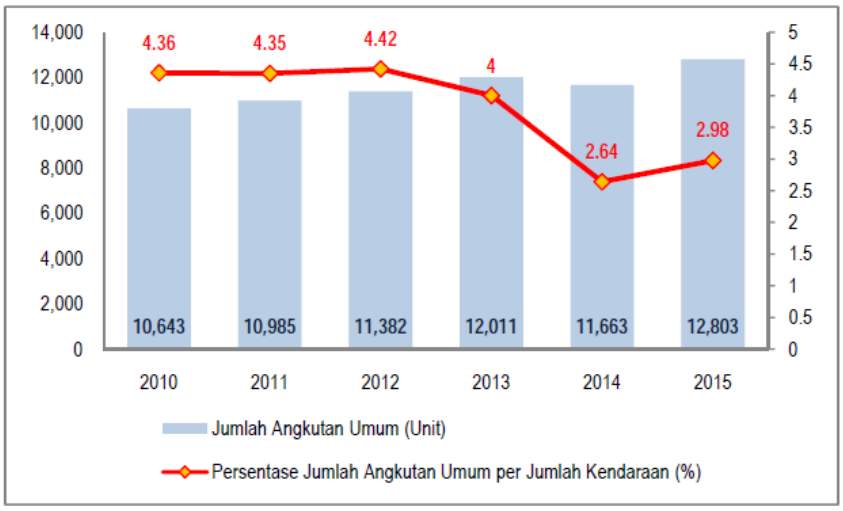

Sumber : RKPD, 2017

Gambar : 2.8
Grafik Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2010-2015

5. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.22

Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	4.610	4.754	4.618	5.410	5.770	6.071	5,66
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027	-
3.	Pemasangan rambu-rambu	%	65,50	67,65	65,72	76,99	82,11	86,4	5,66

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikator pemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni sebesar 65,60% pada tahun 2010 meningkat menjadi 86,4% pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,66% per tahun. Menurut informasi yang didapatkan dari Dinas Perhubungan, jumlah rambu-rambu pada tahun 2012 mengalami penurunan dikarenakan banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang hilang dan ada beberapa rambu-rambu pula yang diturunkan. Selain itu, adanya manajemen lalu lintas baru seperti di Kleringan diduga menjadi salah satu penyebab menurunnya pemasangan rambu-rambu pula. Namun dari tahun 2013 hingga tahun 2015 peningkatan jumlah pemasangan rambu-rambu sudah semakin meningkat kembali.

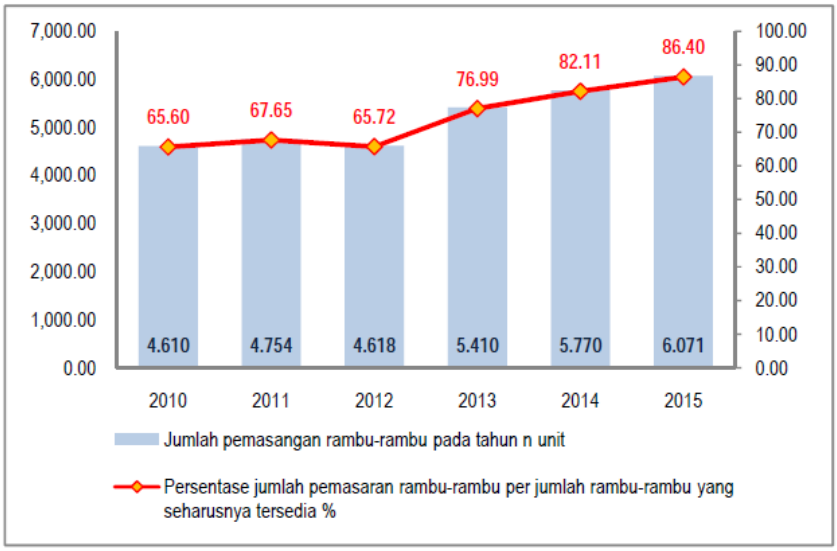

Sumber : RKPD, 2017

Gambar : 2.9
Grafik Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberaparuas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.

H. Transportasi

Permasalahan transportasi Kota Yogyakarta saat ini tidak dapat dilepaskandari permasalahan transportasi perkotaan yang berkembang di

kota-kota besardunia maupun di Indonesia. Peningkatan kemacetan lalu lintas, penurunan keselamatan lalu lintas dan polusi telah menjadi gambaran umum kondisi transportasi di beberapa kota besar di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Kurangnya infrastruktur, pengelolaan sistem transportasi yang buruk serta lemahnya kebijakan pengembangan transportasi yang berkelanjutan merupakan penyebab utama permasalahan tersebut. Kedepan, Yogyakarta akan berkembang menjadi kota besar, bahkan sebagai kota metropolitan, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di kota-kota besar lainnya harus menjadi perhatian agar tidak terjadi di Kota Yogyakarta. Disamping itu identifikasi permasalahan transportasi yang terjadi di Kota Yogyakarta saat ini akan menjadi pijakan bagi penyelesaiaan masalah dan pengembangan sistem transportasi kedepan.

1. Keterbatasan Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi di Kota Yogyakarta terlihat masih kurang mencukupi kebutuhan yang ada. Data yang tersedia hanya menjelaskan ketersediaan fasilitas penunjang jalan berupa rambu dan trotoar. Secara fisik ketersediaan trotoar di Yogyakarta pada tahun 2014 sudah mencapai 81,34%, artinya panjang jalan yang sudah dilengkapi trotoar telah mencapai 81,34%. Meskipun demikian, masih banyak trotoar yang tidak dapat digunakan dengan baik dan benar. Konstruksi trotoar yang rusak dapat membahayakan pengguna. Sejumlah pejalan kaki seringkali tidak tertampung semua di trotoar, lebar trotoar yang ada

dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan, sehingga pejalan kaki terpaksa memanfaatkan badan jalan untuk berjalan kaki dan pada akhirnya akan mengganggu arus lalu lintas.

Keterbatasan prasarana transportasi juga ditunjukkan dengan keterbatasan fasilitas parkir, khususnya gedung dan plataran parkir. Tidak tersedia data pendukung terkait ketersediaan dan kinerja fasilitas parkir di Yogyakarta. Fasilitas parkir merupakan elemen pendukung pergerakan lalu lintas perkotaan yang sangat vital. Setiap kendaraan yang bergerak akan membutuhkan ruang atau fasilitas untuk menyimpan/meletakkan kendaraan pada saat berhenti. Waktu yang digunakan kendaraan untuk berhenti setelah melakukan perjalanan di perkotaan, lebih panjang dibandingkan waktu untuk bergerak. Situasi ini menuntut tersedianya fasilitas/ruang parkir yang besar. Parkir yang ideal bila kendaraan dapat berhenti di gedung parkir atau pelataran parkir. Pada kenyataan, keduajenis fasilitas parkir tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas diwilayah perkotaan Indonesia. Sebagian besar kendaraan masih parkir dibadan jalan. Kondisi ini berdampak besar pada pengurangan lebar efektif jalan yang sangat besar, menurunkan kapasitas jalan, menimbulkan kesemrawutan dan meningkatkan jumlah kecelakaan.

Panjang jaringan jalan yang ada relatif tidak bertambah secara signifikan, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah yang mengakibatkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun dari

0,00084 pada tahun 2007 menjadi 0,00056 pada tahun 2014. Selain menimbulkan kemacetan, kondisi tersebut sangat berpotensi terhadap penurunan keselamatan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari kinerja lalu lintas yang direpresentasikan dengan nilai V/C rasio yang makin membesar (dari 0,44 menjadi 0,81). Semakin besar nilai V/C rasio semakin buruk kinerja lalu lintas yang ditunjukkan dengan penurunan kecepatan atau peningkatan kemacetan jalan. Kondisi ini seringkali diikuti dengan penurunan keselamatan lalu lintas ditunjukkan dengan naiknya fatalitas kecelakaan dari 0,0261 menjadi 0,0608.

2. Layanan Transportasi Belum Optimal

Aspek layanan transportasi di Kota Yogyakarta juga belum menunjukkan kinerja yang bagus, khususnya untuk layanan angkutan umum darat. Terjadi penurunan persentase penggunaan angkutan umum (dari 4,36% menjadi 2,64%), rasio jumlah angkutan umum per 1000 penduduk dari 24,09 menjadi 23,31 dan persen kendaraan umum yang lolos uji KIR dari 78,55% menjadi 64,63%. Situasi ini berkaitan erat dengan indikator lainnya seperti kinerja lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan kualitas udara. Semakin berkurangnya peran angkutan umum pada satusisi, memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan dijaringan jalan semakin padat, penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Kepadatan lalu lintas semakin tinggi, kinerja pergerakan lalu lintas terjadi degradasi. Kemacetan lalu lintas berkembang dimana-mana. Keselamatan lalu lintas juga semakin

menurun dengan penggunaan kendaraan pribadi yang makin luas dan tidak diikuti dengan perilaku berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Jumalah dan fatalitas kecelakaan lalulintas cenderung berkembang semakin tinggi. Dari aspek lingkungan, tidak berkembangnya angkutan umum dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh semakin banyak polutan yang dihasilkan oleh jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat.

Layanan transportasi kereta api perkotaan di Yogyakarta belum dikembangkan. Namun layanan kereta api antar kota telah berkembang, hanya saja masih terlihat adanya penurunan jumlah penumpang dan barang. Khusus untuk transportasi udara memperlihatkan kinerja yang baik, yaitu terjadi peningkatan volume penumpang dan barang yang melalui bandara Adisucipto. Peningkatan ini akan mendorong kebutuhan layanan transportasi darat baik yang bersifat pribadi maupun umum diwilayah perkotaan Yogyakarta.

Penurunan penggunaan angkutan umum perkotaan di Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kemudahan dalam mendapatkan/memiliki sepeda motor dan mobil pribadi serta belum optimalnya kinerja layanan bis perkotaan.

3. Transportasi Wisata

Sebagai kota wisata, Yogyakarta termasuk tujuan wisata yang terkenal di dalam dan luar negeri. Keunikan budaya, masyarakat serta lingkungan Kota Yogyakarta belum didukung sepenuhnya oleh

penyediaan layanan transportasi wisata. Belum ada layanan khusus bagi wisatawan berupa jalur-jalur wisata, kendaraan wisata maupun fasilitas yang memudahkan wisatawan menikmati obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta. Permasalahan ini diantisipasi oleh wisatawan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan sewa(*charter*). Situasi ini selain menyulitkan wisatawan juga memberi tambahan beban lalu lintas perkotaan yang cukup besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan layanan transportasi wisata untuk mendukung peran Kota Yogyakarta sebagai kota wisata.

I. Kebijakan Otoritas Pemerintah Terkait Penataan Ruang

1. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang relevan digunakan dalam hal perencanaan tata ruang yang terkait dengan bidang penataan ruang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun peraturan daerah yang relevan digunakan dalam hal perencanaan tata ruang yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta secara spesifik merencanakan peraturan tentang tujuan penataan ruang kota sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 untuk mewujudkan :

a. ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan

termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Salah satu tujuan penataan ruang kota yaitu keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memberikan perlindungan fungsi ruang. Secara singkat, kebijakan pemerintah DIY dalam program tata ruang memiliki esensi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1 menentukan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup. Terhadap ruang tersebut harus ada penataan, penataan ruang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut diatur dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa: Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

   a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penjelasan Pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 3 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan penataan ruang yaitu terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia fungsi

adalah kegunaan suatu hal. Jadi fungsi ruang berarti kegunaan suatu ruang.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Peraturan Pemeritah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Pasal 1 menentukan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Terhadap ruang tersebut harus ada penataan, penataan ruang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut diatur dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa:

a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, danberkelanjutan;
b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkunganbuatan;
c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional,provinsi, dan kabupaten/kota;
d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruangudara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010

Ruang wilayah Kota Yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistimnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Republik Indonesia, ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumberdaya juga memiliki keterbatasan yang merupakan wadah kegiatan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, effektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Terhadap ruang tersebut harus ada penataan, penataan ruang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan-tujuan tersebut diatur dalam Pasal 6 tujuan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah mewujudkan :

a. ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penjelasan Pasal 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman, yang dimaksud dengan “ nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam situasi tenang dan damai, yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing, yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Rencana penataan ruang yang difokuskan oleh pemerintah DIY untuk daerah kota Yogyakarta melalui pemerintah kota memiliki landasan hukum yang memayungi seluruh program penataan ruang di kota Yogyakarta secara keseluruhan. Landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah DIY adalah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta pada Bab V Pasal 14 dimana program penataan ruang kota Yogyakarta meliputi pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yang diwujudkan berdasarkan

pengembangan struktur ruang kota, sistem pusat-pusat pelayanan kota dan fungsi pusat permukiman kota.

Pada paragraf 1 disebutkan bahwa pengembangan struktur ruang kota meliputi pengembangan struktur ruang kota sebagaimana dimaksudkan untuk memeratakan pertumbuhan pembangunan diseluruh wilayah kota Yogyakarta yang meliputi kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan, kawasan wisata budaya dikembangkan di kecamatan kraton, kecamatan pakualaman dan Kecamatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan prioritas yang harus dikembangkan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang relatif sudah berkembang.Pembagian Kawasan Kota akan dibagi berdasarkan karakter kawasan dan kondisi kawasan fisik alami dan wilayah administrasi kota serta rencana struktur ruang kota Yogyakarta.

Pada paragraf dua disebutkan bahwa sistem pusat-pusat pelayanan diwujudkan dalam pusat pelayanan primer diarahkan untuk melayani masyarakat kota dan sekitarnya serta untuk mengarahkan perkembangan kota dan pusat pelayanan sekunder diarahkan untuk melayani masyarakat kota dalam lingkup skala local. Sistem pusat-pusat pelayanan kota direncanakan membentuk pusat kota, subpusat kota, pusat pelayanan

lingkungan dan subpusat pelayanan lingkungan dimana sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi pusat pelayanan kota dengan skala pelayanan tingkat kota, kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan jasa dan perdagangan skala kota, regional, dan internasional, kegiatan pemerintahan kota, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kota terutama untuk budaya dan pariwisata, subpusat pelayanan kota untuk menciptakan pusat orientasi bagi penduduk kota setingkat kecamatan, yang terdiri dari komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, seperti kegiatan perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kecamatan. Pusat pelayanan lingkungan dengan skala pelayanan lingkungan permukiman setingkat kelurahan, fasi litas yang ditampung berupa fasilitas pelayanan umum skala lingkungan permukiman, seperti sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, puskesmas kelurahan, dan mesjid lingkungan. Subpusat pelayanan lingkungan, dengan skala pelayanan lebih kecil dari pusat pelayanan lingkungan setingkat rukun warga. Di satu sisi, sistem pusat-pusat pelayanan kota berlokasi di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan, subpusat kota tersebar di masing-masing kecamatan, sedangkan pusat pelayanan

lingkungan tersebar di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman.Penjabaran kriteria pusat pelayanan dan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Walikota.

Pada paragraf tiga disebutkan bahwa fungsi pusat pemukiman kota harus disesuaikan dengan kemampuan pusat permukiman baik sebagai pusat kegiatan dalam wilayah lokal, regional atau wilayah yang lebih luas antar kabupaten, provinsi, nasional, maupun secara internasional. Fungsi pusat permukiman kota terdapat pada pusat permukiman yang terdiri dari pusat administrasi provinsi, pusat administrasi kota/kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat perhubungan dan komunikasi, pusat budaya dan pariwisata, pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidi kan, agama), pusat pendidikan dan pusat kegiatan pariwisata. Di satu sisi, fungsi pusat permukiman kota tersebar diseluruh kecamatan tersebut disusun untuk kurun waktu 20 tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010, rencana tata ruang wilayah kota Yogyakarta merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, selain menyusun konsep dan strategi

pembangunan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya, dimana posisi Yogyakarta yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan istimewa di tingkat provinsi dimana hal ini berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu tahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan sebagai Adipati Pakualam sebagai calon wakil Gubernur. Penataan ruang di kota Yogyakarta juga melibatkan kewenangan dari kelembagaan pemerintah daerah DIY yang diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa.

Disatu sisi kewenangan kebudayaan juga akan mempengaruhi tata ruang kota Yogyakarta dengan penyelenggaraan secara sistematis

untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur juga dalam Peraturan Daerah Istimewa.

Sehubungan dengan penyelenggaraan tata ruang, kewenangan pertanahan kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dinyatakan sebagai badan hukum. Kesultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten yang ditunjukkan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan kesultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa dimana Peraturan Daerah Istimewa merupakan Peraturan Daerah Istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa. Disatu sisi, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah tentang rencana tersebut dengan tujuan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; keterpaduan perencanaan tata

ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah; keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan; terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta; terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya; dan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan di Yogyakarta disesuaikan dengan visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta memang memfokuskan diri pada pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, sosio-kultur, dan sosio-ekonomi. Adapun sebuah rencana yang telah disusun oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta telah membagi wilayah-wilayah di Kota Yogyakarta sesuai dengan fungsi lahan yang direncanakan. Pada peta

RTRW yang telah disusun oleh pemerintah Kota Yogyakarta, wilayah Kota Yogyakarta dibagi menjadi fungsi budaya, kesehatan, kuburan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau sempadan sungai, sarana transportasi, dan industri mikro kecil dan menengah. Pembagian wilayah di Kota Yogyakarta tersebut dituangkan dalam peta RTRW Pemanfaatan Pola Ruang (terlampir). RTRW.

Kota Yogyakarta juga mengatur rencana kawasan lindung Kota Yogyakarta. Rencana ini berkaitan dengan konservasi kawasan yang terkait dengan ruang hijau kota, sempadan sungai dan Daerah Aliran Sungai, kawasan inti lindung arkeologi, budaya, dan sejarah, kawasan penyangga alam dan budaya, serta kawasan rawan bencana (tanah longsor dan bencana alam).

Wilayah di Kota Yogyakarta dibagi menjadi kawasan-kawasan tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mengupayakan pelestarian kawasan sesuai dengan peruntukannya. Pembagian kawasan tersebut dijelaskan pada peta RTRW Rencana Kawasan Lindung Kota Yogyakarta (terlampir). Di satu sisi, Kota Yogyakarta juga merupakan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi sasaran untuk pengembangan pariwisata bidang kebudayaan sehingga pemilihan lokasi Kota Yogyakarta sebagai lokasi perencanaan penataan ruang merupakan pilihan yang ideal.